

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara berkembang setiap tahunnya berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang dapat menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk dari suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Tujuan adanya pembangunan yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2010: 11). Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor (Todaro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi merupakan bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan keadaan perekonomian pada suatu daerah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional menggunakan produk domestik bruto (PDB) sementara pada tingkat daerah atau provinsi menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (Badan Pusat Statistik, 2021). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah PDRB, di mana sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 nilai PDRB setiap daerah di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pendapatan yang semakin meningkat di daerah seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2017-2019**

(dalam milyar rupiah)

PROVINSI	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	121240.98	126824.37	132074.25
SUMATERA UTARA	487531.23	512762.63	539513.85
SUMATERA BARAT	155984.36	163996.19	172213.79
RIAU	470983.51	482064.63	495598.10
JAMBI	136501.71	142902.00	149142.59
SUMATERA SELATAN	281571.01	298484.07	315474.27
BENGKULU	42073.52	44164.11	46345.45
LAMPUNG	220626.10	232165.99	244380.37
KEP. BANGKA BELITUNG	49985.15	52208.04	53940.42
KEP. RIAU	166081.68	173498.75	181895.86
DKI JAKARTA	1635359.15	1735208.29	1836198.49
JAWA BARAT	1343662.14	1419624.14	1491575.95
JAWA TENGAH	893750.30	941091.14	991913.12
DI YOGYAKARTA	92300.24	98024.01	104487.54
JAWA TIMUR	1482299.58	1563441.83	1649768.12
BANTEN	410137.00	433782.71	456740.83
BALI	144933.31	154072.66	162694.33
NUSA TENGGARA BARAT	94608.21	90349.13	93869.73
NUSA TENGGARA TIMUR	62725.41	65929.19	69385.99
KALIMANTAN BARAT	124289.17	130596.32	137243.09
KALIMANTAN TENGAH	89544.90	94566.25	100357.57
KALIMANTAN SELATAN	121858.52	128052.58	133271.55
KALIMANTAN TIMUR	452741.91	464694.43	486712.24
KALIMANTAN UTARA	54537.31	57459.31	61422.64
SULAWESI UTARA	79484.03	84249.72	89009.26

SULAWESI TENGAH	97474.86	117555.83	127935.06
SULAWESI SELATAN	288814.17	309156.19	330506.38
<b>PROVINSI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
SULAWESI TENGGARA	83001.69	88310.05	94053.39
GORONTALO	25090.13	26719.27	28428.44
SULAWESI BARAT	29282.49	31114.14	32877.78
MALUKU	27814.05	29457.13	31049.43
MALUKU UTARA	23210.86	25034.08	26561.31
PAPUA BARAT	56907.96	60465.52	62072.75
PAPUA	148818.29	159711.85	134562.24
SULAWESI BARAT	29282.49	31114.14	32877.78

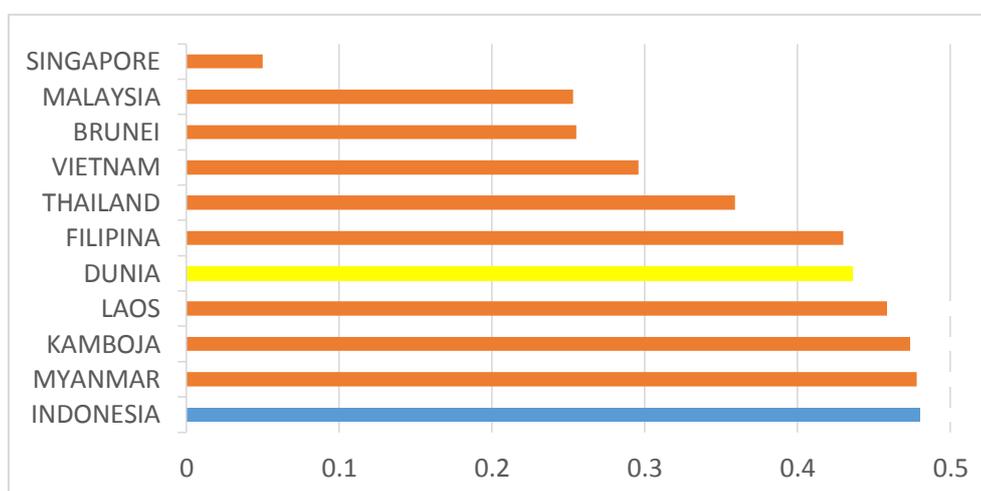
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat seharusnya disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak dan kesempatannya.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar kelompok jenis kelamin mengakibatkan pembangunan tidak mencapai potensi yang optimal (BPS, 2021). Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang di deklarisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam urutan ke 5 dari 17 target yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan intruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam mengukur ketimpangan gender, United Nations Development Program (UNDP) telah mengeluarkan beberapa indikator untuk menggambarkan ketimpangan gender suatu wilayah. Mulai dari *Gender Development Index* (GDI), *Gender Empowerment Measure* (GEM), dan *Gender Inequality Index* (GII). Berdasarkan data UNDP tahun 2019, Indonesia berada di peringkat ke terakhir di negara ASEAN. Angka GII Indonesia berada di atas rata-rata dunia di mana Indonesia memiliki angka sebesar 0,480 sementara rata-rata dunia berada di angka 0,436. Dalam mengukur GII, semakin mendekati 0 artinya kesetaraan sempurna dan semakin tinggi angka GII menandakan ketimpangan semakin besar. Artinya,



ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia dan pada tahun 2019 angka indeks ketimpangan gender Indonesia lebih tinggi daripada rata-rata dunia. Oleh karena

**Gambar 1.1 Indeks Ketimpangan Gender di Asia Tenggara Tahun 2019**  
itu, Indonesia memiliki tugas yang besar dalam hal ketimpangan gender.

Sumber: Human Development Reports, United Nations Development Programme

Sementara jika dilihat dalam skala yang lebih kecil, yaitu seperti pada tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 ketimpangan gender di 6 provinsi di Pulau Jawa cenderung fluktuatif mengalami penurunan. Di Pulau Jawa provinsi yang memiliki indeks ketimpangan gender di atas nilai rata-rata nasional adalah provinsi Jawa Barat dan Banten. Pada tahun 2015, provinsi Jawa Barat dan Banten memiliki indeks ketimpangan gender yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dengan angka masing-masing sebesar 0,479 dan 0,493. Meskipun pada tahun 2016 hingga tahun 2019 indeks ketimpangan gender di provinsi Jawa Barat dan Banten mengalami penurunan tetapi masih berada di atas rata-rata nasional, berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

**Tabel 1. 2 Indeks Ketimpangan Gender di 6 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2015-2019**

<b>PROVINSI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
DKI JAKARTA	0,110	0,212	0,230	0,241	0,187
JAWA BARAT	0,479	0,470	0,456	0,453	0,446
JAWA TENGAH	0,331	0,325	0,305	0,282	0,267
DI YOGYAKARTA	0,152	0,233	0,144	0,169	0,081
JAWA TIMUR	0,397	0,376	0,370	0,366	0,348
BANTEN	0,493	0,475	0,478	0,438	0,452
<b>INDONESIA</b>	<b>0,466</b>	<b>0,464</b>	<b>0,446</b>	<b>0,436</b>	<b>0,421</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Hampir setiap tahun angka ketimpangan gender mengalami penurunan, tetapi pada kenyataannya bahwa ketimpangan gender masih banyak terjadi dalam

beberapa aspek, seperti hak untuk memperoleh akses pendidikan, akses kesehatan dan akses dalam tenaga kerja.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui indeks dari pembangunan gender di suatu negara. IPG digunakan untuk melihat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti indeks pembangunan manusia (IPM) yakni bidang pendidikan dilihat dari harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), di bidang kesehatan dilihat dari angka harapan hidup (AHH) dan standar hidup layak, namun lebih terfokuskan pada mengukur ketidaksetaraan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan (Hariadinata, 2019).

Dalam rentang waktu tahun 2015 hingga 2019, IPG di Indonesia cenderung meningkat dengan nilai rata-rata nasional IPG mencapai angka di atas 90. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) untuk mengukur ketimpangan gender laki-laki dan perempuan dapat menggunakan metode baru yang dipakai oleh UNDP tahun 2010. Pengukuran ketimpangan gender dengan menggunakan metode baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010 yaitu dengan cara menginterpretasikan IPG sendiri. Jika nilai IPG semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Jika IPG kurang dari 100 maka capaian perempuan lebih kecil daripada capaian laki-laki, dan jika IPG lebih dari 100 maka capaian perempuan lebih besar daripada capaian laki-laki. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa capaian IPG suatu daerah tidak

bermakna pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di daerah tersebut sudah tinggi.

Capaian IPG dan IPM di Pulau Jawa tahun 2017 hingga tahun 2019 cenderung fluktuatif. Menurut BPS, Pulau Jawa merupakan pulau yang memberikan sumbangan PDRB terbesar terhadap PDB nasional, pada tahun 2019 besarnya rata-rata sumbangan PDRB Pulau Jawa mencapai 59% terhadap sumbangan nasional. Namun ternyata, besarnya PDRB Pulau Jawa belum mencerminkan pembangunan manusia dan kesetaraan gender di daerahnya, hal ini tercermin dalam nilai IPM dan IPG di beberapa provinsi di Pulau Jawa masih di bawah rata-rata nasional, yakni provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

**Tabel 1. 3 IPM dan IPG di 6 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2017-2019**

PROVINSI	IPM			IPG		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI JAKARTA	80,06	80,47	80,76	94,70	94,70	94,71
JAWA BARAT	70,69	71,30	72,03	89,18	89,19	89,26
JAWA TENGAH	70,52	71,12	71,73	91,94	91,95	91,89
DI YOGYAKARTA	78,89	79,53	79,99	94,39	94,73	94,77
JAWA TIMUR	70,27	70,77	71,50	90,76	90,77	90,91
BANTEN	71,42	71,95	72,44	91,14	91,30	91,67
<b>INDONESIA</b>	<b>70,81</b>	<b>71,39</b>	<b>71,92</b>	<b>90,96</b>	<b>90,99</b>	<b>91,07</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator pembangunan manusia dan pembangunan gender di antaranya adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan menjadi modal dasar dalam pembangunan ekonomi dan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan (Todaro dan Smith, 2009). Meskipun demikian, di Indonesia

termasuk di dalamnya Pulau Jawa masih terjadi ketimpangan gender di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indikator yang digunakan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Variabel rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh setiap penduduk yang mendiami suatu wilayah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dijalani.

**Tabel 1. 4 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di 6 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2017-2019**

PROVINSI	2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI JAKARTA	11,43	10,61	11,46	10,63	11,47	10,65
JAWA BARAT	8,59	7,69	8,60	7,71	8,83	7,90
JAWA TENGAH	7,79	6,78	7,86	6,87	8,06	7,06
DI YOGYAKARTA	9,74	8,73	9,87	8,80	9,92	8,87
JAWA TIMUR	7,93	6,78	7,96	6,85	8,18	7,04
BANTEN	9,07	7,98	9,18	8,04	9,22	8,24

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa pada tahun 2017 hingga 2019 terus meningkat namun masih belum merata terlihat dalam tabel di atas bahwa di beberapa provinsi tertentu yaitu di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur angka rata-rata lama sekolah masih berada di bawah provinsi lainnya di Pulau Jawa. Selain itu, masih terdapat ketimpangan gender di bidang pendidikan, terlihat dari data di atas bahwa rata-rata lama sekolah perempuan masih berada di bawah rata-rata lama sekolah laki-laki. Menurut Todaro dan Smith menyatakan bahwa diskriminasi pendidikan terhadap perempuan dapat menghambat pembangunan ekonomi dan memperbesar ketimpangan sosial (2011).

Selanjutnya, indikator di bidang kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Variabel angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang dalam menjalani hidup. Apabila angka AHH semakin meningkat, artinya program pembangunan kesehatan pemerintah mengalami peningkatan.

**Tabel 1. 5 Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di 6 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2017-2019**

PROVINSI	2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI JAKARTA	70,78	74,41	70,87	74,56	70,96	74,68
JAWA BARAT	70,58	74,42	70,76	74,62	71,03	74,81
JAWA TENGAH	72,16	76,02	72,28	76,10	72,33	76,16
DI YOGYAKARTA	72,95	76,57	73,03	76,65	73,13	76,76
JAWA TIMUR	68,82	72,70	68,99	72,87	69,30	73,15
BANTEN	67,57	71,47	67,72	71,62	67,97	71,81

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka harapan hidup setiap tahunnya mengalami peningkatan namun kenaikan setiap tahunnya tidak begitu besar. Kesehatan merupakan salah satu modal manusia (*human capital*) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena kesehatan merupakan salah satu faktor untuk menunjang peningkatan produktivitas. AHH laki-laki lebih rendah daripada AHH perempuan. Kondisi ini mengindikasikan derajat kesehatan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Menurut BPS (2021) bahwa berdasarkan fakta biologis, usia perempuan akan lebih tinggi daripada usia laki-laki. Lebih tingginya angka harapan hidup pada perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosial dan faktor genetik atau *female advantages* (KPPPA, 2021).

Selain di bidang kesehatan dan pendidikan, selanjutnya yaitu di bidang ketenagakerjaan menggunakan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan besarnya persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.

**Tabel 1. 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di 6 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2017-2019**

PROVINSI	2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI JAKARTA	78,48	45,56	79,57	48,47	81,79	48,02
JAWA BARAT	82,40	43,89	83,08	42,37	83,38	46,45
JAWA TENGAH	82,6	56,26	81,19	56,41	82,43	55,33
DI YOGYAKARTA	80,72	62,69	82,69	64,42	81,95	64,28
JAWA TIMUR	83,85	54,37	83,96	55,43	84,31	55,22
BANTEN	81,15	42,80	81,40	44,93	82,49	45,90

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam tabel 1.6 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Pulau Jawa fluktuatif setiap tahunnya. TPAK laki-laki tertinggi dari tahun 2017 hingga 2019 masih tetap sama yaitu berada di provinsi Jawa Timur, sedangkan TPAK perempuan tertinggi berada di provinsi DI Yogyakarta. Di Pulau Jawa masih terdapat ketimpangan gender yang cukup tinggi dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Menurut Klasen dan Lamanna (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketimpangan dalam kesempatan kerja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Hasil yang cukup tinggi antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan akan berpengaruh terhadap sumbangan pendapatan.

Selain dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan tingkat partisipasi angkatan kerja, ketimpangan gender di Indonesia dapat terlihat

dari besaran pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Hingga saat ini, pertumbuhan pengeluaran per kapita yang diperoleh perempuan selalu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran per kapita. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan dalam pengeluaran per kapita ini karena perbedaan upah yang diterima. Secara umum, rata-rata upah/gaji yang diterima perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki baik dilihat berdasarkan tempat tinggal, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utama dan status perkawinan.

**Tabel 1. 7 Pengeluaran Per Kapita Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di 6 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2017-2019**

PROVINSI	2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI JAKARTA	21620	16433	22345	16762	22912	17087
JAWA BARAT	14495	7599	15258	7905	15760	8173
JAWA TENGAH	14214	9207	14822	9603	15279	9895
DI YOGYAKARTA	16119	12801	16745	13092	17302	13520
JAWA TIMUR	15671	9580	16321	9820	16837	10137
BANTEN	16588	10031	17132	10351	17532	10593

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.7 menunjukkan bahwa setiap tahunnya pengeluaran per kapita di Pulau Jawa mengalami kenaikan namun masih terjadi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Pengeluaran per kapita tertinggi baik perempuan ataupun laki-laki berada di provinsi yang sama yaitu provinsi DKI Jakarta. Untuk itu perlu memperkuat sumber daya manusia perempuan sehingga dapat berkontribusi penuh dalam pembangunan ekonomi.

Ketimpangan gender pada kenyataannya masih terjadi di Indonesia termasuk di Pulau Jawa dalam beberapa aspek kehidupan. Masih terdapat kesenjangan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Ketimpangan gender di Pulau Jawa di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan ekonomi tentunya dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang berfokus pada peningkatan kesetaraan gender agar dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik Regional Bruto 6 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang telah disusun dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh Rasio Rata-rata Lama Sekolah, Rasio Angka Harapan Hidup, Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rasio Pengeluaran Per Kapita laki-laki dan perempuan secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019?
2. Bagaimana pengaruh Rasio Rata-rata Lama Sekolah, Rasio Angka

Harapan Hidup, Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rasio Pengeluaran Per Kapita laki-laki dan perempuan secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui:

1. Mengetahui pengaruh Rasio Rata-rata Lama Sekolah, Rasio Angka Harapan Hidup, Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rasio Pengeluaran Per Kapita laki-laki dan perempuan secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019.
2. Mengetahui pengaruh Rasio Rata-rata Lama Sekolah, Rasio Angka Harapan Hidup, Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rasio Pengeluaran Per Kapita per kapita laki-laki dan perempuan secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2019.

### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung seperti bagi peneliti, bagi mahasiswa, bagi universitas, bagi pemerintah dan peneliti selanjutnya. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai adanya wujud dalam penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan juga sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dan dapat memberikan ilmu bagi peneliti.

## 2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi bagi lingkungan akademik.

## 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akan berguna bagi pemerintah khususnya untuk mengambil kebijakan mengenai permasalahan ketimpangan gender di Pulau Jawa.

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan mengenai pengaruh ketimpangan gender terhadap produk domestik regional bruto di Pulau Jawa.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sebagai bahan penelitian ini secara sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan



